

Strategi Pengembangan Pendidikan berbasis Nilai Etika dan Budaya

Oleh: Prof. Dr. H. Sofyan Sauri, M.Pd

A. Pendahuluan

Akselerasi informasi akibat gelombang globalisasi mendorong kontak antar budaya semakin pesat. Kontak budaya dapat dimaknai sebagai pertemuan antara nilai baru dengan nilai lama yang terjadi di luar maupun di dalam organisasi. Selain itu, salah satu arus besar yang menyertai gelombang globalisasi dewasa ini adalah *homogenisasi* (penyeragaman budaya), di samping *neoliberalisasi* yang merasuk semua ranah kehidupan, termasuk pendidikan. *Information and Communication Technology* (ICT) yang kini kian mutakhir sebagai salah produk dari pesatnya perkembangan IPTEK, telah menghilangkan batas ruang dan waktu sehingga dunia seakan menyatu dalam suatu kampung global (*global village*) dan tersatukan oleh kultur global yang berasaskan pada nilai-nilai *liberalistik-kapitalistik*. Pertukaran informasi termasuk nilai antarbangsa berlangsung secara cepat dan penuh dinamika, sehingga mendorong terjadinya proses perpaduan nilai, kekaburan nilai, bahkan terkikisnya nilai-nilai asli yang sebelumnya sakral dan menjadi identitas suatu bangsa.

Pada saat nilai-nilai *advantage* dari globalisasi digembor-gemborkan oleh para pencetus dan pendukungnya, saat itu pula terjadi proses penggiringan nilai-nilai budaya masyarakat yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya *split* dan kegamangan nilai. Kegamangan nilai yang dialami masyarakat dewasa ini merupakan akibat manusia lebih mengutamakan kemampuan akal, memarginalkan peranan nilai-nilai transendental serta tunduk pada paham individualisme dan kapitalisme. Akibatnya, manusia kehilangan ruh kemanusiaan dan kosong dari nilai-nilai spiritual. Kemampuan otak dan rasionalitas telah mencapai titik puncak dan tidak dibarengi dengan kekuatan ruhaniah, akibatnya hidup menjadi kehilangan makna.

Mengingat tantangan yang dihadapinya semakin nyata dan kompleks, maka proses pendidikan yang berbasis pada nilai etika dan budaya dewasa ini menjadi sangat penting. Tantangannya datang dari berbagai arah, terutama datang sebagai efek dari arus informasi global. Susanto (1998:27) menyebutkan dalam era globalisasi yang terbuka ini, terpaan informasi sangat memungkinkan seseorang mengadopsi nilai-nilai, pengetahuan, dan kebiasaan luar lingkungan sosialnya dan jauh dari jangkauannya secara fisik.

Dalam kondisi semacam itu, pertahanan nilai etika dan budaya yang menjadi pegangan masyarakat akan semakin tergoyahkan, nilai tradisi bangsa Indonesia yang ramah, lembut, dan santun bisa tergilas oleh nilai-nilai baru yang bersandar dan berlindung kepada kebebasan dengan mengatasnamakan hak asasi. Dengan demikian, standar nilai yang dipegang oleh masyarakat akan semakin rapuh dan siap untuk digantikan dengan standar lainnya. Nilai-nilai yang bersumber kepada budaya atau tata nilai yang dipegang teguh masyarakat akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Karena itu, rujukan nilai etika yang dikembangkan oleh pendidikan tidak cukup hanya berdasarkan kepada nilai moral masyarakat, melainkan nilai *transendental* yang bersumber dari agama.

Dewasa ini, pengembangan pendidikan yang berbasis nilai etika dan budaya kurang mendapatkan perhatian, baik di kalangan orang tua (keluarga) maupun guru (sekolah). Hal ini disebabkan orientasi keberhasilan pendidikan yang hanya diukur oleh tingkat intelektualitas siswa. Pembinaan nilai yang membentuk pribadi siswa kurang mendapatkan perhatian, hal tersebut bukan hanya terjadi di dunia persekolahan, di dunia perguruan tinggi pun terjadi. Ranah kognitif acapkali menjadi indikator perguruan tinggi dalam menerima calon mahasiswa, pun ketika menentukan standar prestasi, kompetensi intelektual masih menjadi primadona dalam menentukan kelayakan seorang mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana.

Padahal, pendidikan pada hakikatnya tidak hanya terikat dengan ranah intelektual, melainkan terdapat ranah lain yang lebih mendasar, yakni ranah nilai. Gaffar (2004:8) menyebutkan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar menumbuhkan dan mengembangkan keseluruhan aspek kemanusiaan tanpa diikat oleh nilai, tetapi nilai itu merupakan pengikat dan pengarah proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Dengan demikian, jelaslah bahwa proses pendidikan dalam setiap jenjangnya tidak bisa didikotomikan dengan nilai yang menjadikan pendidikan itu sendiri lebih bermakna.

Selain wajib diintegrasikan dengan ranah nilai etika, praktek pendidikan juga tidak bisa lepas dari keterikatan nilai budaya, karena pada dasarnya salah satu urgensi adanya pendidikan bagi suatu bangsa adalah terjaganya keberlangsungan nilai-nilai budaya/kebudayaan sebagai salah satu nilai luhur yang dirintis oleh *founding fathers* dan nenek moyang suatu bangsa. Makna kebudayaan dapat dikembangkan ke dalam tiga dimensi, yaitu keilmuan, etika, dan estetika. Dimensi keilmuan dilihat dari capaian-capaian pengetahuan dan teknologi, etika dengan penghayatan kebaikan universal dan multikultural dalam kehidupan nasional, serta estetika dengan apresiasi keindahan yang

meningkatkan harkat kehidupan. Kegiatan budaya pada hakikatnya adalah bagaimana warga berkiprah dan menghasilkan sesuatu yang bermakna dalam ketiga dimensi tersebut. Persoalan kebudayaan adalah bagaimana menghadirkan warga dengan kapasitas tertentu untuk dapat terlibat di dalamnya. Penyiapan warga inilah disebut sebagai proses pendidikan.

Menempatkan kebudayaan sebagai ranah yang terpisah dari proses pendidikan, sebagaimana yang dianut oleh pemerintah Indonesia dewasa ini, boleh jadi karena mendefinisikan kebudayaan sebagai produk, bukan sebagai proses. Produk memang lebih mudah dan berharga untuk dijual, apalagi jika berasal dari warisan. Namun, pemerintah dapat terjebak dalam dimensi tunggal, pendidikan dipandang hanya melalui satu departemen, sehingga melalaikan masalah yang paling mendasar, yaitu pendidikan sebagai proses menyiapkan warga berbudaya.

Pada dasarnya, fungsi dari satuan pendidikan adalah memproses warga agar memiliki kemampuan untuk mempraktekan nilai-nilai yang terformulasikan dalam konsep kebudayaan, dengan orientasi utama untuk dimensi keilmuan, etika dan estetika. Terjadinya kemunduran kebudayaan yang ditandai dengan rendahnya kegiatan dan hasil keilmuan dari suatu bangsa, orientasi etika dalam proses pendidikan yang menghasilkan sikap eksklusif dan sektarian di tengah masyarakat majemuk dan global, serta selera estetika warga masyarakat yang semakin rendah merupakan akibat dari adanya praktek pendidikan di lingkungan satuan pendidikan yang tidak berbasis kepada nilai etika dan nilai budaya, dengan kata lain mendikotomikan antara pendidikan, nilai, etika dan budaya.

B. Pendidikan Berbasis Nilai Etika

Dalam perspektif sejarah filsafat, nilai merupakan suatu tema filosofis yang berumur masih muda. Baru pada akhir abad ke-19 nilai mendapat kedudukan mantap dalam kajian filsafat akademis secara eksplisit. Namun secara implisit, nilai sudah lama memegang peranan dalam pembicaraan filsafat, yaitu sejak Plato menempatkan ide 'baik' paling atas dalam hierarki nilai-nilai (Bartens, 2004:12). Kurt Baier (UIA, 2003: 10) mengemukakan bahwa nilai adalah suatu kecenderungan perilaku yang berawal dari gejala-gejala psikologis seperti hasrat, motif, sikap, kebutuhan dan keyakinan yang dimiliki secara individual sampai pada wujud tingkah lakunya yang unik. Sedangkan Allport menyatakan bahwa nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak

atas dasar pilihannya. Bagi Allport nilai terjadi pada wilayah psikologis kepribadian (Allport, 1964:4).

Adapun Kluckhohn dalam Mulyana (2004:5) lebih panjang merumuskan tentang nilai. Ia mendefinisikan nilai sebagai konsepsi dari apa yang diinginkan, yang memengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan antara dan tujuan akhir tindakan. Sementara Bramel dalam Mulyana (2004:5) mengungkapkan bahwa definisi itu memiliki banyak implikasi terhadap pemaknaan nilai-nilai budaya, dalam pengertian lebih spesifik implikasi yang dimaksud adalah.

- Nilai merupakan konstruk yang melibatkan proses kognitif (logis dan rasional) dan proses katektik (ketertarikan atau penolakan menurut kata hati).
- Nilai selalu berfungsi secara potensial, tetapi selalu tidak bermakna apabila diverbalisasi.
- Apabila hal itu berkenan dengan budaya, nilai diungkapkan dengan cara yang unik oleh individu atau kelompok.

Penulis memberikan pandangan bahwa pendidikan nilai adalah merupakan upaya sadar dan terencana dalam berperilaku secara spontan sebagai hasil binaan sejak kecil, melekat dan spontanitas, jadi pendidikan nilai adalah pendidikan akhlak, atau pendidikan budi pekerti dengan sumber firman-firman Allah dan sabda-sabda Nabi Muhammad saw.

Deskripsi pendidikan berbasis nilai mencakup keseluruhan dimensi pendidikan. Tujuan pendidikan nilai yang ideal adalah membentuk kepribadian manusia seutuhnya. Tujuan ini diarahkan untuk mencapai manusia seutuhnya yang berimplikasi pada pendidikan nilai sebagai keseluruhan praktek pendidikan di lingkungan satuan pendidikan. Karena itu, pendidikan nilai berarti keseluruhan dimensi pendidikan yang dilakukan melalui kegiatan pengembangan, baik kegiatan kurikulum, ekstrakurikuler, dan seluruh kegiatan belajar mengajar yang dikatakan sebagai upaya penanaman nilai dalam pendidikan.

Pendidikan nilai dapat menjadi sarana ampuh dalam menangkal pengaruh-pengaruh negatif yang terjadi dalam kehidupan masyarakat global dewasa ini. Sejalan dengan derap laju pembangunan dan laju perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta arus reformasi sekarang ini, pendidikan nilai semakin dirasa penting sebagai salah satu alat pengendali bagi tercapainya tujuan pendidikan nasional secara utuh.

Kaitanya dengan nilai etika, kata etika atau *ethics* (bahasa Inggris) itu sendiri memiliki banyak arti, secara etimologi istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* yang mempunyai arti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Adapun dalam bentuk jamaknya *ta etha* yang artinya adat kebiasaan. *Ta etha* menjadi latar belakang terbentuknya istilah “etika” yang oleh filsuf Yunani besar Aristoteles (384-322) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jika dilihat dari asal-usul kata etika, maka etika dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.

Selain secara etimologis, kita dapat melihat pengertian etika dari kamus, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang lama (Peoerwadarmita,1953), etika dijelaskan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988), etika dirumuskan dalam tiga arti sebagai berikut:

- Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
- Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
- Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Menanggapi tiga pengertian etika di atas, Bertens (2004:5) mengemukakan bahwa urutan tiga arti tersebut kurang kena, sebaiknya arti ketiga ditempatkan di depan karena lebih mendasar daripada yang pertama dan rumusannya juga bisa dipertajam lagi. Dengan demikian, menurut Bertens (2004:6) tiga arti Etika dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai “sistem nilai” dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. Misalnya etika orang Jawa dan etika agama Budha.
- Etika dipakai dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud disini adalah kode etik, misalnya Kode Etik Advokat Indonesia.
- Etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti etika di sini sama dengan filsafat moral.

Etika juga disebut ilmu normatif, maka dengan sendirinya berisi ketentuan-ketentuan (norma-norma) dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga sering mendengar istilah *descriptive ethics*, *normative ethics* dan *philosophy ethics*. *Descriptive ethics*, ialah gambaran atau lukisan tentang etika, *Normative ethics*, ialah norma-norma tertentu tentang etika agar seseorang dapat dikatakan bermoral sedangkan *philosophy ethics* ialah etika sebagai filsafat, yang menyelidiki kebenaran.

Pengertian Etika juga dikemukakan oleh Sumaryono (1995), menurutnya bahwa Etika berasal dari istilah Yunani *ethos* yang mempunyai arti adat-istiadat atau kebiasaan yang baik. Bertolak dari pengertian tersebut etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan manusia pada umumnya. Selain itu, Etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia.

Menurut Wiramiharja (2006 : 158) pada dasarnya etika meliputi empat pengertian:

- Etika merupakan sistem nilai kebiasaan yang penting dalam kehidupan kelompok khusus manusia.
- Etika digunakan pada suatu di antara sistem-sistem khusus tersebut yaitu “moralitas” yang melibatkan makna dari kebenaran dan kesalahan, seperti salah dan malu.
- Etika adalah sistem moralitas itu sendiri mengacu pada prinsip-prinsip moral aktual.
- Etika adalah suatu daerah dalam filsafat yang memperbincangkan telaahan etika dalam pengertian-pengertian lain.

Etika baru menjadi ilmu bila disusun secara metodis dan sistematis yang terdiri dari asas-asas dan nilai baik buruk. Jadi etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dinilai jelek dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran. Pengertian etika sebagai ilmu merupakan suatu studi yang mempelajari tentang segala soal kebaikan dalam hidup manusia semuanya, mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan perasaan sampai mengenai tujuannya. Beberapa ahli yang menyatakan bahwa etika sebagai ilmu antara lain;

- Ahmad Yamin, Etika diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik-buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan

yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat.

- Soegarda Poerbakawatja, etika adalah sebagai filsafat nilai, kesusilaan tentang baik-buruk, berusaha mempelajari nilai-nilai dan merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri.
- Ki Hajar Dewantara mengartikan etika sebagai ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia semuanya, teristimewa yang mengenai gerak-gerik pikiran, rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan rasa perasaan sampai menguasai tujuannya yang dapat merupakan perbuatan.
- Austin Fogothey mengartikan etika sebagai ilmu yang berhubungan dengan seluruh ilmu pengetahuan tentang manusia dan ilmu masyarakat yang erat hubungannya dengan antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, ilmu politik dan ilmu hukum.
- Ahmad Zubair mengartikan etika sebagai cabang filsafat, yaitu filsafat etika atau pemikiran filsafat tentang moralis, problem moral dan pertimbangan moral.
- H. Devos mengartikan etika sebagai ilmu pengetahuan mengenai kesusilaan secara ilmiah.
- Asmaran AS mengartikan etika sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia untuk menentukan nilai-nilai perbuatan tersebut baik dan buruk, sedangkan ukuran untuk menetapkan nilainya adalah akal pikiran manusia.
- Hamzah Ya'kub menyatakan etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.
- Burhanudin Salam mengartikan etika sebagai sebuah refleksi kritis dan rasional menyamai nilai-nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujudnya dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun secara kelompok.
- Surahwaldi Lubis mengartikan etika sebagai ilmu filsafat tentang nilai-nilai kesusilaan, tentang baik dan buruk.

- Pudjawijatna mengartikan etika sebagai ilmu yang mencari kebenaran. Ia mencari keterangan benar sedalam-dalamnya. Tugas etika adalah mencari ukuran baik buruknya tingkah laku manusia.
- Lewis Mustofa Adam mengartikan etika sebagai ilmu tentang filsafat, tidak mengenai fakta, tetapi tentang nilai-nilai, tidak mengenai sifat tindakan manusia tetapi tentang idenya.
- M. Yatimin Abdullah mengartikan etika sebagai ilmu yang mempelajari tentang baik-buruk. Jadi etika bisa berfungsi sebagai teori perbuatan baik dan buruk (*ethics atau ilm al-akhlak al-karimah*) praktiknya dapat dilakukan dalam disiplin filsafat.
- Magnis Suseno mengartikan etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral.
- Sumantri mengartikan Etika sebagai suatu ilmu yang mengadakan ukuran yang dapat dipakai untuk menanggapi dan menilai perbuatan manusia yang berhubungan dengan perbuatan kesusilaan yang benar (*normative*).
- Socrates mengungkapkan bahwa etika membahas baik-buruk, benar-salah dalam tingkah laku, tindakan manusia, dan menyoroti kewajiban-kewajiban manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas, sesungguhnya etika dapat dibedakan menjadi tiga macam pemahaman yaitu:

- Etika sebagai ilmu, yang merupakan kumpulan tentang kebajikan, tentang penilaian dari perbuatan seseorang.
- Etika dalam arti perbuatan, yaitu perbuatan kebajikan. Misalnya seseorang dikatakan etis apabila orang itu telah berbuat kebajikan.
- Etika sebagai filsafat, yang mempelajari pandangan-pandangan, persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan.

Menurut Suseno (1991:15) sekurang-kurangnya terdapat empat alasan, mengapa etika pada zaman sekarang semakin perlu.

- Kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moralitas. Dan kita sering dihadapkan dengan sekian banyak pandangan moral, sehingga kadang bingung mana yang akan kita ikuti.

- Kita hidup dalam masa transformasi masyarakat yang tanpa tanding. Perubahan itu terjadi di bawah hantaman kekuatan yang mengenai semua segi kehidupan kita, yaitu gelombang modernisasi. Dalam transformasi ekonomi, sosial, intelektual dan budaya itu nilai-nilai budaya yang tradisional ditantang semuanya.
- Dalam hal ini etika membantu agar kita tidak kehilangan orientasi, dapat membedakan antara yang hakiki dan apa saja yang boleh berubah, sehingga kita tetap sanggup mengambil sikap-sikap yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Tidak mengherankan bahwa proses perubahan sosial budaya dan moral yang kita alami kini dipergunakan oleh berbagai pihak untuk memancing di air keruh.

Dengan demikian etika dapat membuat kita sanggup untuk menghadapi ideologi-ideologi itu secara kritis dan objektif dan untuk penilaian sendiri, agar kita tidak terlalu mudah terpancing. Etika juga berguna membantu kita agar tidak naif atau ekstrim. Etika diperlukan oleh kaum beragama yang disatu pihak menemukan dasar kemandirian mereka dalam iman kepercayaan mereka di lain pihak sekaligus mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah. Etika mau membantu, agar kita lebih mampu untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita.

Etika tidak langsung membuat manusia menjadi lebih baik, melainkan etika merupakan sarana untuk memperoleh orientasi kritis untuk berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan. Etika ingin menampilkan keterampilan intelektual yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Pluralisme moral diperlukan karena pandangan moral yang berbeda-beda karena adanya perbedaan suku, daerah budaya dan agama yang hidup berdampingan, modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur dan nilai kebutuhan masyarakat yang akibatnya menantang pandangan moral tradisional, berbagai ideologi menawarkan diri sebagai penuntun kehidupan, masing-masing dengan ajarannya sendiri tentang bagaimana manusia harus hidup.

Mengingat sangat strategisnya posisi sistem nilai etika dalam kehidupan, terlebih tantangan dewasa ini semakin besar, maka pendidikan sebagai *core program* dalam upaya membentuk generasi harapan masa depan bangsa, wajib hukumnya untuk diintegrasikan dengan seperangkat nilai yang terformulasikan dalam konsep etika. Hal ini perlu dijabarkan oleh para praktisi pendidikan ke dalam seluruh komponen

pendidikan, lebih spesifiknya dalam komponen-komponen pembelajaran seperti tujuan, materi, metode, media, sumber dan evaluasi.

Dengan mengembangkan pendidikan yang berbasis pada nilai etika, maka diharapkan dapat terbentuk generasi yang kokoh idiologinya, mantap sikap mentalnya dan memiliki pondasi yang kuat dalam menghadapi serangan nilai luar yang datang bersamaan dengan derasnya arus global. Generasi yang mampu melihat secara tegas tentang apa yang baik dan apa yang buruk, hak dan kewajiban moral (akhlak), mampu mengejawantahkan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, serta memegang teguh sistem nilai mengenai benar dan salah yang dianut bangsanya.

Dalam konteks pendidikan nasional, fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 bab II pasal 3 sebagai berikut:

"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Adanya kata-kata mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat tentunya perlu diupayakan melalui formulasi pendidikan nasional yang tepat. Indikator watak dan peradaban bermartabat itu sendiri tentunya adalah ketika terbentuk generasi yang betul-betul menghargai dan menghormati sistem nilai bangsanya. Watak dan peradaban yang bermartabat hanya dapat diraih oleh pendidikan yang betul-betul mengintegrasikan sistem nilai yang anut bangsanya ke dalam seluruh komponen pendidikan. Dengan demikian, jelaslah bahwa upaya pengembangan pendidikan yang berbasis kepada nilai etika suatu bangsa menjadi sangat penting.

C. Pendidikan Berbasis Nilai Budaya

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) dan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata Latin *Colere*, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kebudayaan mengandung

keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain.

Soemardjan dan Soemardi (1974:113) mengungkapkan bahwa kebudayaan adalah hasil karya, rasa dan cipta manusia. **Karya** masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan *jaasmaniah (material culture)* yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam semesta, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat. **Rasa** yang meliputi jiwa manusia mewujudkan segala kaidah dan nilai-nilai sosial yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti yang luas, di dalamnya termasuk ideologi, kebatinan, kesenian dan semua unsur hasil ekspresi jiwa manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat. Adapun **cipta** merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir orang-orang yang hidup bermasyarakat dan yang menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan. Cipta merupakan wujud teori murni dan juga terapan yang langsung dapat diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Rasa dan cipta dinamakan pula kebudayaan *rohaniyah (spiritual atau immaterial culture)*. Semua karya, rasa dan cipta dikuasai oleh **karsa** orang-orang yang menentukan kegunaanya agar sesuai dengan kepentingan sebagian besar atau dengan seluruh masyarakat.

Iris Varner dan Linda Beamer dalam *Intercultural Communication in the Global Workpalce* yang dikutip oleh Alo Liliweri dalam bukunya *Makna Budaya dalam Komunikasi Budaya* (2003;7-8) memberikan pandangan tentang pengertian kebudayaan, bahwa kebudayaan merupakan pandangan yang koheren tentang sesuatu yang dipelajari, yang dibagi, atau yang dipertukarkan oleh sekelompok orang. Sementara Larry A Samovar dan Richar E Porter dalam buku yang sama memberikan pandangan bahwa kebudayaan dapat berarti simpanan akumulatif dari pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, pilihan waktu, peranan, relasi ruang, konsep yang luas dan objek material atau kepemilikan yang dimiliki dan dipertahankan oleh sekelompok orang atau suatu generasi.

Kebudayaan dapat diartikan juga sebagai sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi,

seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Salah satu referensi yang bisa menjadi acuan untuk mengetahui hakikat kebudayaan adalah ungkapan pelopor antropologi modern, Edward B Tylor sebagaimana dikutip oleh H.A.R Tilaar (1999:39) bahwa :

“Budaya atau peradaban adalah suatu keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat”

Definisi yang sederhana ini memberikan beberapa hal yang perlu kita simak lebih lanjut yang kiranya bermanfaat sebagai kerangka untuk menyimak hakikat kebudayaan sebagai berikut :

1. Kebudayaan merupakan suatu keseluruhan yang kompleks. Hal ini berarti bahwa kebudayaan merupakan suatu kesatuan dan bukan jumlah dari bagian-bagian. Keseluruhannya merupakan pola-pola atau desain tertentu yang unik. Setiap kebudayaan mempunyai mozaik yang spesifik.
2. Kebudayaan merupakan suatu prestasi kreasi manusia yang a material artinya berupa bentuk-bentuk prestasi psikologis seperti ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni dan sebagainya.
3. Kebudayaan dapat pula berbentuk fisik seperti hasil seni, terbentuknya kelompok-kelompok keluarga, dan sebagainya
4. Kebudayaan dapat pula berbentuk kelakuan-kelakuan yang terarah seperti hukum, adat istiadat yang berkesinambungan
5. Kebudayaan diperoleh dari lingkungan
6. Kebudayaan merupakan suatu realitas yang objektif, yang dapat dilihat.
7. Kebudayaan tidak terwujud dalam kehidupan manusia yang soliter atau terasing tetapi yang hidup di dalam suatu masyarakat tertentu.

Menurut J.J. Hoenigman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga: gagasan, aktivitas, dan artefak (karya).

- **Gagasan;** Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak; tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan

ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut.

- **Aktivitas;** Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan **sistem sosial**. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati dan didokumentasikan.
- **Artefak (karya);** Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret diantara ketiga wujud kebudayaan.

Edgar H. Schein dalam Ndraha (1997:44) mengidentifikasi tingkat budaya menjadi, (1) *Artifacts*, yaitu struktur dan proses organisasional purba yang dapat diamati tetapi sulit ditafsirkan. (2) *Espoused Values*, yaitu tujuan, strategi, dan filsafat. (3) *Basic underlying assumptions*, yaitu kepercayaan, persepsi, dan perasaan yang menjadi sumber nilai dan tindakan.

Adapun menurut Ndraha (1997:44), jika dihubungkan dengan nilai, tingkat budaya dapat didefinisikan menurut kuantitas dan kualitas *sharing* (keberbagian) suatu nilai dalam masyarakat. Pertama, semakin banyak anggota (aspek kuantitatif) masyarakat yang menganut, memiliki, dan menaati nilai, semakin tinggi tingkat budaya. Dilihat dari sudut ini, ada budaya global, budaya regional, budaya bangsa, budaya daerah, dan budaya setempat. Kedua, semakin mendasar penaaan nilai (aspek kualitatif), semakin kuat budaya. Dilihat dari sudut ini, budaya dapat dikelompokkan menjadi budaya kuat, budaya sedang, dan budaya lemah.

Fungsi budaya pada umumnya sukar dibedakan dengan fungsi budaya kelompok atau fungsi budaya organisasi karena budaya merupakan gejala sosial. Namun demikian, dapat dilihat beberapa fungsi budaya, antara lain:

1. Sebagai identitas dan citra suatu masyarakat. Identitas ini terbentuk oleh berbagai faktor, seperti sejarah, kondisi dan sisi geografis, sistem social, politik dan ekonomi, serta perubahan-perubahan dalam masyarakat (Charles Hampden-Turner; 1994).

Perbedaan dan identitas budaya (kebudayaan) dapat mempengaruhi kebijaksanaan pemerintahan di berbagai bidang.

2. Sebagai pengikat suatu masyarakat. Kebersamaan (*sharing*) adalah faktor pengikat yang kuat seluruh anggota masyarakat.
3. Sebagai sumber. Budaya merupakan sumber inspirasi, kebanggaan, dan sumber daya. Budaya dapat menjadi komoditi ekonomi misalnya wisata budaya.
4. Sebagai kekuatan penggerak. Jika budaya terbentuk melalui proses belajar-mengajar (*learning process*), budaya itu dinamis, *resilient*, tidak statis, dan tidak kaku.
5. Sebagai kemampuan membentuk nilai tambah. Ross A. Webber mengaitkan budaya dengan manajemen, John P. Kotter dan James L. Heskett menghubungkan budaya dengan *performance*, Charles Hampden-Turner dengan kekuatan organisasional dan keunggulan bisnis.
6. Sebagai pola perilaku. Budaya berisi norma tingkah laku dan menggariskan batas-batas toleransi social.
7. Sebagai warisan. Budaya disosialisasikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya.
8. Sebagai substitusi (pengganti) formalisasi.
9. Sebagai mekanisme adaptasi terhadap perubahan. Dilihat dari sudut ini, pembangunan seharusnya merupakan proses budaya.
10. Sebagai proses yang menjadikan bangsa kongruen dengan Negara sehingga terbentuk *nation-state*.

Seperti yang sudah disinggung dalam bagian pendahuluan bahwa *homogenisasi* atau penyeragaman budaya menjadi suatu gejala dalam proses globalisasi dewasa ini, sehingga menjadi tantangan besar bagi eksistensinya nilai-nilai budaya asli (lokal dan nasional) suatu bangsa. Menjaga kontinuitas nilai-nilai budaya suatu bangsa hanya dapat dilakukan melalui pendidikan. Karena dengan pendidikan dapat terjadi transformasi nilai antar generasi sebagai upaya penanaman nilai dan menjaga kelestarian sistem nilai suatu bangsa.

Gejala negatif akibat derasnya hantaman budaya global diantaranya adalah kebudayaan lokal kehilangan citra di masyarakat. Penghargaan terhadap tradisi lokal mulai meluntur, digantikan dengan konsumsi kebudayaan baru yang seringkali tidak memiliki akar kultural. mempraktikkan budaya lokal seolah identik keterbelakangan dan tidak modern. Dalam dunia akademik hal tersebut tercermin dalam penghormatan terhadap pendidik yang tidak sekuat zaman dahulu. Menurut Ashadi Siregar sesungguhnya banyak aspek budaya lokal yang memiliki tingkat relevansi dan

kecanggihan tinggi. Seperti konsep *student centered learning* yang dewasa ini dikembangkan dalam prakek pendidikan nasional, ternyata sudah hadir dalam akar tradisi bangsa Indonesia sejak zaman terdahulu. Konsep Tut Wuri Andayani, Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, pada hakekatnya kongruen dengan *student centered learning*. Filosofi dasar pemikiran Ki Hajar itu adalah untuk menjadi motivator, menjadi dinamisator, bahkan menjadi pemimpin tidak selalu harus di garis depan.

Pendidikan berbasis nilai budaya bukan bermakna budaya sebagai sebuah warisan hidup yang berusia panjang. Pemaknaan ini memiliki peluang besar terjebak dalam tradisionalisme yang serba tradisi dan takut inovasi. Padahal tradisi pun selalu membuka dimaknai ulang, direinterpretasi, bahkan dieksklusi. Pendidikan berbasis nilai budaya dapat berarti membuka ruang kreatifitas nan luas bagi para praktisi pendidikan, namun selalu dikendalikan oleh norma-norma budaya bangsa yang sudah menjadi identitas dan memiliki nilai luhur sebagai warisan budaya bangsa.

Dalam teori nilai, kebudayaan menjelaskan fenomena sosial secara moralistik, hitam putih, boleh-tidak, sedangkan dalam teori sosial, kebudayaan akan melihat akar masalahnya yang seringkali berada dalam tataran sosial dan ekonomi. Pendidikan berbasis nilai budaya berarti menyeimbangkan pemahaman estetis dan progresif tentang kebudayaan dalam praktek pendidikan. Untuk mendorong hal tersebut dibutuhkan tiga hal utama. *Pertama*, dibutuhkan pemahaman dan pemikiran kebudayaan secara holistik, bukannya sektoral. *Kedua*, gerak strategi kebudayaan dan gerakan sosial harus berjalan seiring, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. *Ketiga*, kesadaran bahwa perubahan kebudayaan dan sosial yang saat ini terjadi adalah perubahan besar-besaran, baik dalam magnitude maupun dalam intensitasnya, terjadi di segala tingkatan, termasuk basis materialnya. Sehingga pendidikan sebagai entitas program nasional menjadi penting untuk terintegrasi dengan seperangkat nilai budaya bangsa.

Proses globalisasi bukan merupakan proses satu dimensi, melainkan multi dimensi termasuk aspek budaya. Salah satu pertanyaan yang diajukan dalam dimensi kultural ini adalah, apakah globalisasi meningkatkan *homogenitas* kultural atau apakah ia akan mengarah pada perbedaan dan *heterogenitas* yang lebih beragam, atau dalam bahasa yang sederhana apakah globalisasi menjadikan orang semakin sama atau semakin berbeda? Menurut Tomlison, misalnya mendefinisikan globalisasi kultural sebagai semakin meningkatnya jaringan saling keterkaitan dan *interdependensi* kultural yang kompleks yang menjadi ciri kehidupan sosial modern. Bahwa arus kultural global

dikendalikan oleh perusahaan media internasional yang memanfaatkan berbagai teknologi komunikasi baru untuk membentuk masyarakat dan identitas. Ketika citra dan gagasan dapat kian mudah cepat dialirkan dari satu tempat ketempat lain, maka kultur menjadi tidak lagi berkaitan dengan lokalitas yang tetap seperti kota atau negara, tapi mendapat makna baru yang mencerminkan tema dominan yang muncul dalam konteks global. Salingketerkaitan yang disebabkan oleh oleh globalisasi kultural ini menentang nilai-nilai dan identitas parokial, karena kesalingketerkaitan tersebut melemahkan hubungan yang mengaitkan kultur pada kepastian lokasi

Meskipun telah terjadi perdebatan yang panjang tentang bukti-bukti ilmiah dampak globalisasi telah melahirkan *homogenitas* budaya dan atau *heterogenitas* budaya, namun yang paling jelas adalah globalisasi telah menjadikan budaya Amerika merasuki seluruh umat manusia mulai dari makanan, pakaian, musik, film, bahasa dan gaya hidup bahkan *science*. Ada kecenderungan telah terjadi penyerbuan budaya Amerika ke seluruh dunia. Hal ini bisa terjadi karena globalisasi menurut Appadurai telah melahirkan lima *scape* (*ethnoscape*, *technoscape*, *finanscape*, *mediascape*, dan *ideoscape*) yang dengan leluasa proses Amerikanisasi dapat berjalan dengan mulus.

Bagaimana sikap bangsa dan negara yang berhadapan langsung dengan proses globalisasi, seperti Indonesia? Tentu saja sebagai bangsa yang berdaulat dan memiliki nilai-nilai budaya dan agama yang sangat kaya, maka selayaknya dikembangkan model pendidikan nilai yang mampu memperkokoh dan memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

Secara filosofis pendidikan nilai harus berbasis pada nilai-nilai budaya masyarakat dan nilai-nilai agama yang diyakini masyarakat. Pengembangan aspek filosofis pendidikan nilai ini akan dihadapkan pada tantangan secara lokalitas. Secara lokalitas bahwa budaya masyarakat Indonesia sangat majemuk baik corak maupun maknanya, tidak jarang terjadi perbedaan-perbedaan budaya itu telah mengarah pada *ethnosentrisme* yang berlebihan. Jadi persoalannya adalah pilihan nilai-nilai mana yang akan diambil dari budaya majemuk itu untuk dijadikan sebagai landasan pendidikan nilai. Apakah akan mengangkat nilai-nilai budaya yang berbeda atau menjadikan nilai budaya mayoritas sebagai standar pilihan nilai untuk pendidikan nilai. Pilihan ini semuanya akan melahirkan konsekuensi yang kompleks.

Demikian juga dengan nilai-nilai yang diambil dari agama. Agama yang diyakini bangsa Indonesia sangat beragam dan semuanya merupakan agama-agama besar dunia (Islam, Kristen, Hindu, Budha), apakah akan menjadikan semua agama yang diyakini bangsa Indonesia itu sebagai landasan pendidikan nilai atau salah satu agama

atau agama mayoritas menjadi standar basis pendidikan nilai. Semua pilihan ini juga akan membawa implikasi yang luas dan rumit. Menjadikan salah satu agama sebagai landasan pendidikan nilai bukan tanpa konsekuensi, karena dalam agama sendiri banyak faham dan aliran yang telah membuat garis segmentasi yang jelas antar faham-faham kelompok yang dianggap berbeda-beda. Landasan pendidikan nilai juga akan dihadapkan kepada suatu kenyataan bahwa beragamnya budaya dan agama yang diyakini masyarakat Indonesia telah melahirkan sistem budaya masyarakat Indonesia bercorak ragam. Menurut Harsya W. Bachtiar (1985:3) di Indonesia paling tidak terdapat empat sistem budaya yang telah menunjukkan jati dirinya dan memiliki akar yang kuat, yaitu

- sistim budaya etnik
- sistim budaya agama-agama besar
- sistim budaya Indonesia dan
- sistim budaya asing.

Keempat sistim budaya di atas telah menjadikan sebagai karakteristik dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, apabila pendidikan nasional yang akan dikembangkan adalah pendidikan berbasis nilai budaya, maka landasan yang menopangnya paling tidak diambil dari empat sistim nilai budaya yang sudah mapan tersebut. Tantangan pendidikan nilai dalam prakteknya berkaitan dengan pilihan nilai-nilai budaya dan agama yang akan dijadikan sebagai landasan pendidikan nilai di Indonesia.

Tantangan pendidikan nilai dari arus globalisasi sangat tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Pertama apabila misi pendidikan nilai yang akan dikembangkan adalah untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai sendiri sebagai upaya untuk memperkuat jati diri, maka tantangannya adalah bagaimana mempertahankan nilai-nilai tersebut dari serbuan nilai-nilai luar yang dibawa dari arus globalisasi. Seperti telah dijelaskan dalam uraian terdahulu bahwa globalisasi juga merupakan proses budaya, yaitu proses budaya Amerikanisasi, dimana menjadikan budaya Amerika menjadi budaya dunia. Pada posisi seperti ini maka yang terjadi adalah budaya lokal berhadapan dengan budaya global.

Budaya global yang *notebene* budaya Amerika adalah budaya yang berbasis dari nilai-nilai liberalisme yang bercirikan, individualisme, kebebasan, sekularisme,

materialisme, pragmatisme, rasionalisme yang kesemua nilai-nilai itu tidak relevan atau bertentangan baik dengan nilai-nilai budaya lokal maupun nilai-nilai agama (Islam) yang dianut masyarakat Indonesia. Secara alamiah pertarungan budaya lokal dengan budaya global ini akan semakin memperkuat budaya global dan akan menggeser budaya lokal, mengingat kekuatan global ditopang oleh sistem teknologi komunikasi, informasi dan transportasi yang terus meningkat. Disinilah tantang pendidikan nilai di era globalisasi, bagaimana membendung nilai-nilai budaya global yang tidak sesuai dengan kekuatan pendidikan nilai yang belum teruji.

Tantangan berikutnya adalah kehandalan metodologi pendidikan nilai dalam menghambat laju pesat Amerikanisasi budaya Amerika melalui teknologi komunikasi dan informasi. Bisa saja pendidikan nilai dapat berjalan dan diterapkan di sekolah-sekolah atau luar sekolah, tetapi sejauhmana kehandalannya dalam membentuk watak dan pribadi siswa sesuai dengan nilai-nilai dirinya. Sebab ketika di sekolah diajarkan tentang moralitas, tentang larangan untuk *free sex*, atau pornografi tetapi ketika ke luar kelas semua lingkungan dan media mengajarkan *free sex* dan pornografi, sementara waktu siswa lebih lama berada di lingkungan ini di bandingkan dengan berada di lingkungan sekolah. Sehingga pendidikan nilai yang diajarkan di sekolah menjadi kurang bermakna.

Dengan segala tantangan yang datang dari proses globalisasi budaya dan pilihan-pilihan nilai budaya lokal, maka bangsa Indonesia harus menjawabnya dengan mengembangkan pendidikan yang berbasis pada nilai budaya bangsa, sehingga bangsa Indonesia tidak kehilangan jati diri yang sudah menjadi watak dan peradaban bangsa.

Sebagai benang merah, pendidikan berbasis nilai budaya dapat dimaknai sebagai wujud dari upaya internalisasi budaya. Dalam bahasa Inggris, *internalized* berarti *to incorporate in oneself*, Internalisasi berarti proses menanamkan dan menumbuhkembangkan suatu nilai atau budaya menjadi bagi diri (*self*) orang yang bersangkutan. Penanaman dan penumbuhkembangan nilai tersebut dilakukan melalui berbagai didaktik-metodik pendidikan dan pengajaran, seperti pendidikan, pengarahan, indokrinasi, *brainwashing*, dan sebagainya.